

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Secara etimologi, asuransi atau dalam bahasa Inggris disebut insurance, memiliki arti penanggungan. Asuransi adalah suatu kesepakatan (polis) antara perusahaan asuransi (penanggung) atau dengan yang ditanggung (tertanggung) atau nasabah. Yang mana pihak penanggung bersedia melalui kesepakatan akan menanggung kerugian yang mungkin akan menghampiri tertanggung dimasa mendatang dan kewajiban si tertanggung adalah menyetorkan sejumlah uang, dengan nominal yang telah disepakati dalam polis dimana hal ini disebut juga sebagai premi.

Beberapa ahli juga tak lepas memberikan penjelasan dalam pengertian Asuransi, seperti halnya Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H. menjelaskan bahwa Asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas. Prof. Mehr DAN Cammack juga menyatakan bahwa asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan

cara sebuah pengumpulan unit-unti eksposur dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan¹.

Sedangkan dalam Undang-Undang terkait asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan oada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah diterapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan ialah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena sebuah kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹ Bitar, *6 pengertian Asuransi Menurut Para Ahli*, <https://gurpendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Lembaran Negara RI Nomor 337 Tahun 2014, Pasal 1 Butir 1

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

2. Sejarah Asuransi

Sejarah asuransi di Indonesia merupakan sejarah panjang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, budaya gotong royong yang telah tertanam pada masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah banyak melahirkan perkumpulan-perkumpulan kematian, keagamaan dan sosial di kalangan penduduk kota maupun desa. Melalui perkumpulan-perkumpulan itu penduduk menciptakan perlindungan (proteksi) terhadap kematian dan masalah-masalah keagamaan serta sosial.

a. Masa Penjajahan Belanda

Asuransi jiwa seperti yang kita kenal sekarang, dimulai dengan didirikannya *Nederlandsche Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij* (NILMIJ) di Batavia pada tanggal 31 Desember 1859. Kemudian maskapai-maskapai asuransi yang berkedudukan di negeri Belanda meluaskan daerah operasinya ke Indonesia dengan mendirikan cabang atau filial, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pemegang polis (bangsa Belanda) yang ditempatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, disamping karena mereka melihat pasaran asuransi cukup potensial di Indonesia³.

³ Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta 1979

Disamping maskapai-maskapai asuransi Belanda, beberapa perusahaan asuransi asing ikut juga menggarap pasaran asuransi di Indonesia seperti Great Eastern, Shanghai Life, China Mutual, dan Sun Life Company of Canada. Sejalan dengan banggunya kesadaran nasional bangsa Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, berdiri pula perusahaan asuransi jiwa dari kalangan bangsa Indonesia, seperti :

1. Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Persatuan Guru Hindia Belanda (O.L. Mij PGHB) pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, yang dipelopori oleh R.W. Dwidjosewajo bersama dua orang temannya dalam mengurus PGHB, yaitu M. Karto Hadi Soebroto dan M. Adimidjojo. Kemudian namanya diganti menjadi O.L. Mij Boemi Poetra, dan akhirnya seperti yang kita kenal sekarang dengan nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
2. V. Indonesia (Samratulangi)
3. De Bataviasche Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij.
4. De Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij Djawa⁴.

Perusahaan-perusahaan asuransi ini berbentuk perusahaan bersama (onderling) sesuai dengan jiwa gotong royong yang telah tertanam sejak dahulu kala di kalangan bangsa Indonesia. Asuransi kerugian pun tidak ketinggalan digarap oleh para pengusaha

⁴ Ibid

Belanda, karena melihat pasaran asuransi kerugian potensial di Indonesia. Perusahaan asuransi kerugian yang pertama bekerja di Indonesia adalah Bataviasche Zee en Brand Assurantie Maatschappij (1843). Kemudian menyusul perusahaan asuransi kerugian N.V. Assurantie Mij Nederlansche Lloyd (1853), menyusul Assurantie Mij Langeveld Schroeder dan Assurantie Mij Blom van der Aa.

Sebagai anak cabang dari N.V. Assurantie Mij Nederlansche Lloyd (1853), didirikan perusahaan asuransi kebakaran Indische Lloyd pada tanggal 1 September 1916. Perusahaan asuransi ini masih berdiri hingga sekarang dengan menggunakan nama PT. Lloyd Indonesia.

b. Masa Penjajahan Jepang

Masa pemerintahan militer Jepang di Indonesia selama perang dunia ke-2 merupakan zaman yang paling buruk dalam sejarah sosial-ekonomi Indonesia. Perekonomian tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Uang Jepang yang digunakan di Indonesia dicetak tanpa batas, sehingga inflasi merajalela.

Akibatnya satu demi satu perusahaan di Indonesia gulung tikar, termasuk perusahaan asuransi nasional. Yang bisa bertahan dengan susah payah hanya O.L. Mij Boemi Poetera. Agar tidak berbau Belanda yang tidak disukai oleh Jepang maka “O.L. Mij”

diubah menjadi Perseroan “Tangoeng Djiwa” (PTD) sehingga namanya menjadi PTD Boemi Poetera.

c. Masa Indonesia Merdeka

Setelah Jepang kalah dalam perang dunia ke-2 dan Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia sehingga pecah Perang Kemerdekaan (1945 – 1949). Walaupun dalam suasana perang, para pengusaha Belanda yang bergerak dalam bisnis asuransi mendirikan Bataviasche Verzekering Unie (BVU) pada tahun 1946. Mereka melakukan kegiatan bisnisnya secara patungan. Dalam penutupan asuransi, setiap anggota BVU mendapat bagian tertentu untuk ditanggung.

Sistem patungan itu dijalankan karena pada waktu itu, masih kurang tenaga teknis dan sarana asuransi. Namun pada tahun 1948, tenaga teknis dan sarana asuransi telah memadai, maka BVU bubar dan masing-masing anggota berdiri sendiri. Perang kemerdekaan berakhir. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menandatangani perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar). Tetapi perjanjian KMB itu memberi peluang kepada para pengusaha Belanda untuk membuka kembali perusahaannya di Indonesia.

Maka maskapai-maskapai dagang Belanda termasuk maskapai asuransi Belanda beroperasi kembali di Indonesia.

Pemerintah dan para pengusaha Indonesia pun mendirikan perusahaan-perusahaan dagang termasuk perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Perusahaan Asuransi Kerugian terdiri dari :

1. V. Maskapai Asuransi Indonesia.
2. Asuransi Waringin Lloyd.
3. Asuransi Murni.
4. Asuransi Gajah Mada.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa terdiri dari :
 6. Dharma Nasional, milik pemerintah dan swasta, didirikan pada tahun 1954.
 7. Iman Adi, didirikan pada tahun 1961.
 8. Djaminan, didirikan pada tahun 1962.
 9. Sukma Sedjati, didirikan pada tahun 1962.
 10. Affan, didirikan pada tahun 1964.

* PTD Boemi Poetera, yang selama tahun 1943 – 1948 tidak dapat mengadakan investasi diaktifkan kembali. Pada tahun 1952, tubuh Boemi Poetera dikonsolidasikan dan disehatkan dengan mengaktifkan Dewan Perencana. Pada tahun 1954, dilaksanakan modernisasi Boemi Poetera. Ketika berkobar perjuangan membebaskan Irian Barat dari belenggu penjajahan Belanda, para karyawan bangsa Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan

Belanda mengambil alih semua perusahaan Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia⁵.

Sesuai dengan ketetapan pemerintah Indonesia, sembilan perusahaan asuransi jiwa bekas milik Belanda digabung menjadi satu dengan nama PN. Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera dan kemudian diubah lagi namanya menjadi PN. Asuransi Djiwasraya (Unit I). Dengan maksud agar hanya ada satu perusahaan asuransi jiwa milik negara, maka perusahaan asuransi jiwa Dharma Nasional dijadikan perusahaan negara dengan mengembalikan modal swasta. Lalu namanya diganti menjadi PN. Asuransi Djiwasraya (Unit II). Pada tahun 1969, kedua perusahaan asuransi milik negara itu digabung menjadi PT. Asuransi Djiwasraya.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, maka perusahaan-perusahaan negara asuransi kerugian diciutkan jumlahnya dengan cara penggabungan sehingga hanya terdiri dari PT. Bendasraya dan PT. Umum International Underwriter. Dan pada tanggal 2 Juni 1974, kedua perusahaan negara asuransi kerugian digabung menjadi satu perusahaan negara dengan nama PT. Asuransi Jasa Indonesia.

d. Asuransi Zaman Modern di Indonesia

Di era 1980-an, adalah titik awal munculnya asuransi-asuransi modern di Indonesia. Beberapa diantaranya yang masih

⁵<http://www.media-asuransi.com/sejarah-asuransi/4-sejarah-asuransi-di-indonesia.html>

eksis sampai sekarang adalah AIA Financial, Allianz, CIGNA, Avrist AXA Mandiri, Asuransi Sinar Mas, dan Prudential. Asuransi-asuransi tersebut sudah tidak lagi berfokus pada satu perlindungan melainkan banyak sekali produk asuransi yang ditawarkan. Bahkan tidak hanya asuransi beberapa perusahaan tersebut juga menawarkan produk investasi.

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2014, pemerintah membuktikan kinerjanya dalam melayani masyarakat khususnya di bidang proteksi jiwa dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang produknya saat ini menjadi produk asuransi unggulan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS saat ini menggantikan fungsi Askes dan Jamsostek yang berlaku pada periode sebelumnya.

3. Perjanjian Asuransi

Perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUHPdt perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa

kelemahan yang perlu di koreksi. Kelemahan- kelemahan tersebut adalah sebagai berikut⁶:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan” Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit- dikitnya dua orang (subjek);
 - b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
 - c. Ada objek yang berupa benda;
 - d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
 - e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
4. Perusahaan Asuransi

Perusahaan merupakan suatu lembaga atau suatu instansi yang pada hakikatnya berada ditengah-tengah masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri, sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224

Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analitis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi nasabahnya.⁷

Dalam hal ini, perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif, sebagaimana perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya. Seperti pendapat P.F. Drucker yang menyatakan

⁷ Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 260.

bahwa pada hakikatnya perusahaan itu mempunyai dua fungsi pokok saja yaitu pemasaran dan pembaharuan⁸.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil risiko pihak lain adalah lembaga asuransi. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas. Karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Disamping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan individual maupun kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu ataupun risiko kolektif.

Perusahaan Asuransi di Indonesia terdiri dari beberapa type perusahaan asuransi, yaitu :

1. Perusahaan Asuransi umum yang dimana perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi dalam lini usaha asuransi kesehatan dan lini asuransi kecelakaan diri dan atau usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa yang dimana perusahaan asuransi ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa yang dimana usaha ini bergerak dalam lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; Beberapa perusahaan Asuransi Jiwa

⁸ Sri Rejeki Hartono, *Loc.cit*

3. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha Reasuransi;
4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha Asuransi Umum syariah yang terdiri dari usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah;
5. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah;
6. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah;
7. Perusahaan Pialan Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi;
8. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang reasuransi;
9. Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan. Pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam, masyarakat atau institusi-

institusi lain. Atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Kegiatan usaha perasuransian, khususnya usaha asuransi merupakan jenis yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Dimana hal ini dibuktikan dengan aturan yang mengatur perusahaan asuransi sejak tanggal 11 Februari 1992 yang melalui Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian, kemudia diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang ada dasarnya merupakan hukum public yang mengatur kegiatan usaha perasuransian, sedangkan perjanjian yang timbul sehubungan dengan kontrak asuransi diatur tersendiri dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁹

Hal ini membuktikan bahwa Perusahaan Asuransi haruslah sesuai dengan standart kriteria yang telah ditentukan oleh Undang-undang di Indonesia, selain itu sama halnya dengan perusahaan lain dimana Perusahaan Asuransi juga tidak lepas dari pengawasan OJK dalam pekerjaan yang dilakukannya.

5. Peran Pemerintahan dalam pengawasan asuransi

Dengan beroperasinya OJK (sejak 31 Desember 2012), fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan IKNB beralih dari Bapepam-LK Kementerian Keuangan kepada OJK . Meskipun demikian, kewenangan perumusan kebijakan umum di bidang perbankan, pasar

⁹ Julius Latumaerissa, 2011, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 45

modal, dan IKNB tidak akan pernah sepenuhnya dapat dilepaskan dari Pemerintah, karena perumusan kebijakan umum tersebut dilaksanakan melalui penyusunan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya¹⁰

1. Undang-Undang Dasar 1945

a. Pasal 5 ayat (1) dan (2)

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR
2. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang Pasal 20
3. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. Pasal 6 ayat (1): Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 49 ayat (2): Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas
2. **Pasal 57 ayat (2)**

¹⁰ Isa Rachmatarwata, *Peran Pemerintah Pada Sektor Perasuransian*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta 14 Februari 2015

Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional

3. Penjelasan Pasal 57 Ayat (2)

Kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional meliputi hal kepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah Penyusunan Undang-Undang mengenai program penjaminan polis, yang dibentuk paling lama 3 tahun sejak UU 40/2014 diundangkan (Pasal 53)

d. Penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai:

1. Badan hukum usaha bersama, yang antara lain mengatur tata kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama (Pasal 6 ayat 3)
2. Kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing dan kepemilikan warga negara asing dalam Perusahaan Perasuransian (Pasal 7 ayat 3)

3. Perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial (Pasal 84 ayat 2)
4. Mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah, guna memenuhi kebutuhan pertanggungan dalam negeri, melalui langkah-langkah seperti (Pasal 37):
 5. membentuk perusahaan reasuransi baru menggabungkan beberapa badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi
 6. memberikan fasilitas untuk pembentukan *pool* atau konsorsium asuransi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam
 7. menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri perasuransian
8. Undang-Undang 40/2014 juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib secara kompetitif (Pasal 39)
9. Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan
10. Penyelenggara Program Asuransi Wajib dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi

11. Penyelenggara Program Asuransi Wajib dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan.¹¹

B. Peran OJK Dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

2. Latar Belakang Pembentukan OJK dan Peralihan Tugas dari BI ke OJK

Pembentukan OJK dilatar belakangi adanya krisis moneter yang melanda Indonesia di akhir tahun 1990-an. Krisis tersebut mengakibatkan dilikuidasinya 16 bank dan dikucurkannya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada sejumlah bank. Lemahnya pengawasan perbankan oleh BI menyebabkan jatuhnya industri perbankan dan terpuruknya perekonomian Indonesia yang berkepanjangan. Selain pengawasan yang lemah, BI diduga terlibat praktek kolusi dengan bank-bank yang diawasinya.¹²

¹¹ Ibid

¹² Agus Budianto, 2011, *mengkaji kejahatan korporasi di Bidang Perbankan Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, UPH Law Review, Vol. XI, No. 2, Hlm. 277,250.

Secara umum segala bentuk pengurusan pasar modal dan semua lembaga non-Bank juga beralih dari kementrian keuangan kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengurusan mengenai lembaga ataupun sector perbankan sendiri baru dialihkan kepada OJK pada 31 Desember 2013. Dalam hal pembentukan OJK diperuntukan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan terselanggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan kepentingan konsumen maupun masyarakat.

3. Wewenang, Fungsi dan Tugas OJK

a. Wewenang OJK

OJK sendiri merupakan institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini,

Wewenang OJK dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 baik dalam sector perbankan ataupun seluruh lembaga keuangan yaitu :

1. Pasal 7 mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.

- a. Pengaturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; dan
- d. pemeriksaan bank

2. Pasal 8 mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan Jasa Keuangan

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undangt-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;

- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan;
- h. menetapkan stuktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

b. Tugas OJK

pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik fee(iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN

Tugas OJK dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 yaitu :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c. Fungsi OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan, pengawasan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.

Dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 3 sektor, yaitu :

a. Kegiatan jasa Keuangan di sektor Perbankan

Yaitu segala aspek yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah

b. Kegiatan jasa Keuangan di sektor Pasar Modal

Yaitu pengawasan dalam segala usaha kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasal modal.

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹³

1. Segala kegiatan pengawasan dalam usaha perasuransian yang bergerak disektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperentaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

¹³ www.ojk.go.id

2. Yaitu segala aspek pengawasan terhadap badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pension.

3. Yaitu segala aspek pengawasan terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

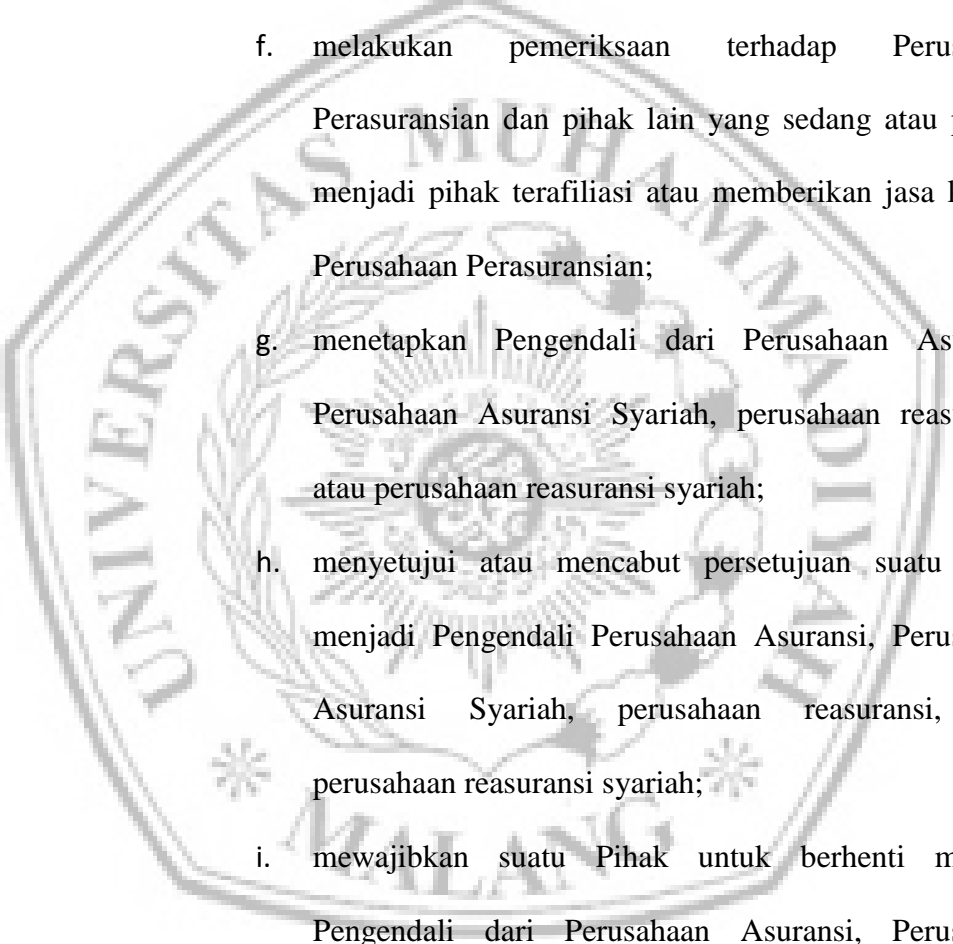
4. yaitu pengawasan dalam segala aspek terhadap lembaga lembaga jasa keuangan lainnya seperti halnya pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.

Dalam Hal ini Dapat ditunjukan bahwa terkait dengan kegiatan pengaturan dan pengawasan di sektor Perasuransian merupakan tugas yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga terkait dengan perasuransian baik itu Perusahaan Asuransi , Agen perusahaan Asuransi dan Nasabah atau Calon Nasabah asuransi akan selalu bersangkutan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki tugas penting dalam pengawasan dari tindak lanjut Perusahaan Asuransi, sehingga sangat penting untuk diketahui apakah peran yang

dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada masa kini sudah sesuai dengan Tugas yang diberikan kepada OJK maupun sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Dalam perannya sebagai pengawas perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
 - b. mencabut izin Usaha Perasuransian;
 - c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

- 
- d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - g. menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
 - h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
 - i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah¹⁴;

Dalam hal ini menunjukan bahwa OJK mempunyai wewenang penuh dalam pengawasan dan perkembangan perasuransian di

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian, Lembaran Negara RI Nomor 337 tahun 2014 pasal 60 ayat 1 dan ayat 2

Indonesia. Selain itu pula OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas jasa dan informasi mengenai perusahaan Asuransi dan Agen Perusahaan asuransi. OJK juga berwenang menghentikan segala bentuk penjualan jasa Perusahaan Asuransi yang dapat merugikan masyarakat, calon nasabah dan nasabah dari perusahaan asuransi serta segala tindakan yang perlu dan sesuai dengan peraturan perasuransian di Indonesia. OJK juga bertugas untuk membuka pelayanan pengaduan oleh konsumen ataupun masyarakat atas suatu tindakan tidak sesuai yang dilakukan oleh perusahaan asuransi maupun agen perusahaan asuransi apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau konsumen. Dalam hal membuka pelayanan pengaduan secara tidak langsung OJK juga dapat memberikan perlindungan hukum ataupun melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan perasuransian untuk menyelesaikan pengaduan yang merugikan konsumen atau masyarakat.

4. Bentuk Tindakan yang dilakukan OJK dalam Pengawasan Perasuransian sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana pada huruf C dijelaskan bahwa OJK Memiliki wewenang “ Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, Perlindungan Konsumen dan Tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

a. Pengawasan

Pengawasan dalam segi lapangan maupun penerimaan laporan, apakah hal hal terkait dengan perasuransian sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku atau belum.

b. Pemeriksaan

Apabila terjadi suatu pelanggaran , klaim ataupun diduga suatu pihak dalam perasuransian melakukan suatu pelanggaran pihak OJK bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dengan hal tersebut.

c. Penyidikan

Penyidikan dilakukan apabila telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan memang terjadi suatu keganjalan dalam proses perasuransian pihak OJK bertugas untuk melakukan penyidikan guna untuk menyelesaikan masalah.

d. Perlindungan Konsumen

Hal hal yang dilakukan diatas juga berdasarkan fungsi untuk melindungi hak konsumen sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dengan perasuransian yang ada.

e. Edukasi

Pihak OJK juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tidak paham akan pentingnya asuransi.

